

ISSN : 0852-6206

NO.II/TH.XXXVI/2011

MAJALAH ILMIAH

**HUKUM
DAN
MASYARAKAT**

- Echwan Iriyanto, S.H., M.H.** : Pemberian Kompensasi Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme
- Edy Wahjuni, SH., M.Hum.** : Kegiatan Usaha Perusahaan Modal Ventura Dalam Perusahaan Pasangan Usaha
- Warah Atikah, S.H., M.Hum.** : Penguasaan Tanah Untuk Kepentingan Kepemilikan Lahan Makam Modern
- Halif, S.H., M.H.** : Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa
- Ratih Listyana Chandra, S.H., M.H** : Peranan Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Budaya Asli Bangsa (*Folklore*) Berdasarkan UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
- Siti Sudarmi, S.H., M.H.** : Pemenuhan Hak Anak Korban Kejahatan Dan Implementasinya Sebagai Bentuk Perlindungan Anak
- Multazaam Muntahaa, S.H., M.Hum.** : Pemeriksaan Terhadap Pengendara Sepeda Motor Yang Melanggar Peraturan Lalu Lintas Jalan



Diterbitkan oleh :

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER**

HUKUM DAN MASYARAKAT

- Echwan Iriyanto, S.H., M.H.** : Pemberian Kompensasi Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme
- Edy Wahjuni, SH., M.Hum.** : Kegiatan Usaha Perusahaan Modal Ventura Dalam Perusahaan Pasangan Usaha
- Warah Atikah, S.H., M.Hum.** : Penguasaan Tanah Untuk Kepentingan Kepemilikan Lahan Makam Modern
- Halif, S.H., M.H.** : Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa
- Ratih Listyana Chandra, S.H., M.H** : Peranan Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Budaya Asli Bangsa (Folklore) Berdasarkan UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
- Siti Sudarmi, S.H., M.H.** : Pemenuhan Hak Anak Korban Kejahatan Dan Implementasinya Sebagai Bentuk Perlindungan Anak
- Multazaam Muntahaa, S.H., M.Hum.** : Pemeriksaan Terhadap Pengendara Sepeda Motor Yang Melanggar Peraturan Lalu Lintas Jalan



Diterbitkan oleh :

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER**

HUKUM DAN MASYARAKAT

Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Jember

Terbit 4 Bulan sekali pada bulan April, Agustus dan Desember

Penanggung Jawab	: Prof. Dr.M.Arief Amrullah, S.H.,M.Hum
Ketua Penyunting	: I Wayan Yasa, S.H.,M.H.
Dewan Penyunting	: 1. Dwi Endah Nurhayati, S.H.,M.Hum 2. Iswi Hariyani, S.H.,M.H. 3. Warah Atikah, S.H.,M.Hum
Penyunting Pelaksana	: 1. Dra. Tutik Patmiati 2. Dodik Prihatin AN, S.H.,M.H. 3. Aan Effendi, S.H.,M.H.
Pelaksana Administrasi	: 1. Asnan, S.H. 2. Bambang Joko Lelono

HUKUM DAN MASYARAKAT adalah majalah ilmiah Fakultas Hukum Universitas Jember. Majalah ini sebagai media penuangan pelbagai pemikiran masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum dan masyarakat, di samping sebagai media komunikasi antara Fakultas Hukum Universitas Jember dengan para alumninya.

Pemuatan tulisan dalam majalah ini bukan berarti sebagai pandangan dari Redaksi atau fakultas, tetapi merupakan pendapat pribadi penulisnya. Redaksi menerima naskah karangan, terutama dari warga Sivitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Jember. Naskah yang dikirim kepada Redaksi maksimal 15 halaman kuarto diketik 1,5 spasi.

Alamat Redaksi: Fakultas Hukum Universitas Jember
Jl. Kalimantan Nomor 37 Jember
Telp. (0331) 335462,322808, 322809
Fax : (0331) 330482
<http://www.fh.unej.ac.id>
majalahhukum_fh@unej.ac.id

PENGANTAR REDAKSI

Hukum sebagai salah satu bidang ilmu yang dipelajari di perguruan tinggi, pada akhirnya diharapkan mampu memberikan bekal pengetahuan kepada siapa saja yang membutuhkan. Oleh karena itu, perguruan tinggi melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan harapan tersebut. Salah satu di antaranya adalah penerbitan Majalah Hukum dan Masyarakat secara berkala oleh Fakultas Hukum Universitas Jember, juga dimaksudkan untuk membantu memberikan pencerahan kepada siapa saja yang berminat mempelajari bidang ilmu hukum.

Pada edisi **II/TH.XXXVI/2011** ini Majalah Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Jember menampilkan berbagai tulisan dari para dosen. Adapun tulisan-tulisan tersebut, adalah : **Pemberian Kompensasi Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme; Kegiatan Usaha Perusahaan Modal Ventura Dalam Perusahaan Pasangan Usaha; Penguasaan Tanah Untuk Kepentingan Kepemilikan Lahan Makam Modern; Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa; Peranan Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Budaya Asli Bangsa (Folklore) Berdasarkan UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta; Pemenuhan Hak Anak Korban Kejahatan Dan Implementasinya Sebagai Bentuk Perlindungan Anak; dan Pemeriksaan Terhadap Pengendara Sepeda Motor Yang Melanggar Peraturan Lalu Lintas Jalan.**

Semoga berbagai tulisan tersebut mampu memberikan tambahan pengetahuan berupa informasi baru yang berkaitan dengan bidang ilmu hukum. Semoga!

Dewan Redaksi,

DAFTAR ISI

	Halaman
PengantarRedaksi	i
Daftar Isi	ii
Echwan Iriyanto,S.H.,M.H. : Pemberian Kompensasi Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme	1
Edy Wahjuni, SH.,M.Hum. : Kegiatan Usaha Perusahaan Modal Ventura Dalam Perusahaan Pasangan Usaha	19
Warah Atikah, S.H.,M.Hum : Penguasaan Tanah Untuk Kepentingan Kepemilikan Lahan Makam Modern	33
Halif, S.H.,M.H. : Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa	53
Ratih Listyana Chandra, S.H., M.H : Peranan Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Budaya Asli Bangsa (Folklore) Berdasarkan UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta	73
Siti Sudarmi, S.H., M.H. : Pemenuhan Hak Anak Korban Kejahatan Dan Implementasinya Sebagai Bentuk Perlindungan Anak	85
Multazaam Muntahaa, S.H., M.Hum. : Pemeriksaan Terhadap Pengendara Sepeda Motor Yang Melanggar Peraturan Lalu Lintas Jalan	103
Ketentuan Naskah	116

**PERANAN PEMERINTAH DALAM MEMBERIKAN
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BUDAYA ASLI
BANGSA (*FOLKLORE*) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA**

Oleh: Ratih Listyana Chandra, S.H., M.H.

Abstraksi

Untuk melindungi *folklor* milik Indonesia, pemerintah mempunyai peranan yang sangat besar dengan melakukan berbagai macam upaya. Upaya-upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah berkenaan dengan perlindungan atas *folklor* dapat berupa penyusunan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga pencipta atau pemilik suatu *folklor* merasa tenang karena hak-haknya sebagai pencipta atau pemilik suatu *folklor* diakui dan dilindungi oleh negara. Upaya lain yang bisa dilakukan pemerintah adalah dengan melakukan pendokumentasian kepemilikan folklor bangsa. Dengan adanya *data base* ini diharapkan tidak ada lagi pengklaiman folklor oleh pihak yang tidak berhak. Upaya terakhir yang bisa ditempuh yaitu dengan menyiapkan *benefit sharing* yang tepat. Oleh karena itu, apabila *folklor* tersebut dimanfaatkan oleh pihak lain, pencipta atau pemegang hak, negara dapat mengajukan gugatan atau pembayaran royalti secara adil.

Kata kunci: *folklor*, hak cipta.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang dicapai masyarakat dunia, khususnya dalam bidang komunikasi, transportasi dan informasi, telah menjadikan hubungan antar individu, antar badan hukum, dan antar pemerintah berbagai negara, semakin mudah dan lancar. Kondisi ini pula yang menjadikan dunia semakin mengglobal, yang oleh masyarakat internasional sering disebut sebagai era globalisasi. Dalam hubungan itu, globalisasi ekonomi adalah salah